

RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS KOMINFO

KABUPATEN KEDIRI

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2025 telah dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut. Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

KATA PENGANTAR

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kita semua dalam menjalankan mandat atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

KEDIRI, 2 JANUARI 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI

Dr. NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19811203 200604 1 014

Daftar Isi

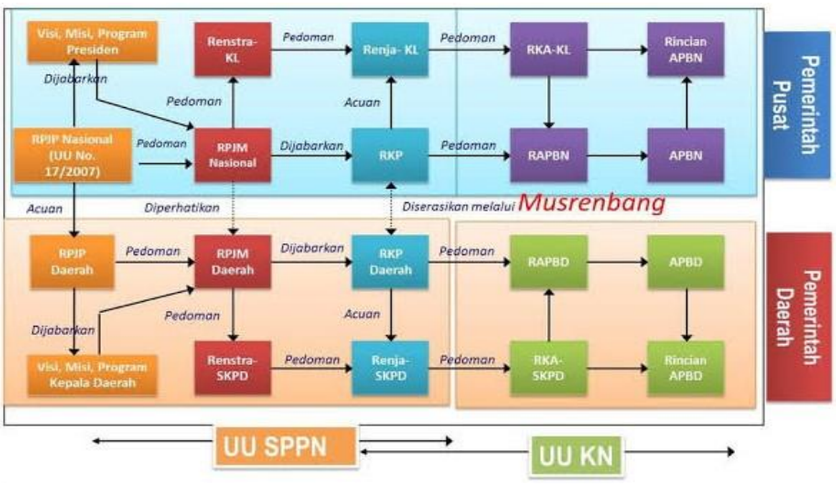
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN iii
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 37
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 50
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 50
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah 63
3.3 Program dan Kegiatan 65
BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI 71
BAB V PENUTUP 76

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 merupakan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan provinsi. Oleh karena itu substansi Rencana Kerja (Renja) harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kediri sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Program dan kegiatan serta pendanaan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri 2025 disusun berdasarkan:

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
c. Program prioritas yang tertuang dalam Misi II Kabupaten Kediri yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuka Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 39);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2025 dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2025 adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah**, Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, Reviu terhadap rancangan awal dan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III **Tujuan**, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan yaitu telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, serta perencanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Bab VI **Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab V **Penutup**, Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun lalu. Pada Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri secara umum telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja, dengan hasil capaian akhir kegiatan "baik" dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 95,21% (Sembilan Puluh Lima Koma Dua Puluh Satu Persen). Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2023 dengan capaian sebesar Rp 22.299.184.635,00 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dari yang dianggarkan sebesar Rp 23.420.198.819,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Seratus Sembilan Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah) dari Komponen Belanja Daerah dijelaskan sebagai berikut:

a. **Belanja Operasi** alokasi anggaran sebesar Rp 17.819.578.444,00 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), terealisasi Rp 16.918.875.635,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau dengan persentase sebesar 94,95% (Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Lima Persen) terdiri dari :

1) Belanja Pegawai, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.765.264.802,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah) terealisasi Rp 3.549.522.294,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau dengan persentase sebesar 94,27% (Sembilan Puluh Empat Koma Dua Puluh Tujuh Persen)

KABUPATEN KEDIRI
RENCANA KERJA TAHUN 2025

2) Belanja Barang dan Jasa, alokasi anggaran sebesar Rp. 14.054.313.642,00 (Empat Belas Milyar Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) terealisasi Rp. 13.369.353.341,00 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau dengan persentase sebesar 95,13% (Sembilan Puluh Lima Koma Tiga Belas Persen)

b. **Belanja Modal** dianggarakan sebesar Rp 5.600.620.375,00 (Lima Milyar Enam Ratus Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), terealisasi Rp 5.380.309.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah) atau dengan persentase sebesar 96,07% (Sembilan Puluh Enam Koma Tujuh Persen) terdiri dari terdiri dari :

1) Belanja Peralatan dan Mesin dianggarakan sebesar Rp. 2.865.220.375,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), terealisasi Rp 2.797.439.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau dengan persentase sebesar 97,63% (Sembilan Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Tiga Persen)
2) Belanja Aset dan Lainnya, dianggarakan sebesar Rp. 2.735.400.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) terealisasi Rp. 2.582.870.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau dengan persentase sebesar 94,42% (Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Dua Persen).

Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 secara ringkas tertuang dalam tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
BELANJA OPERASI	17.819.578.444,00	16.918.875.635,00	94,95%
Belanja Pegawai	3.765.264.802,00	3.549.522.294,00	94,27%
Belanja Barang dan Jasa	14.054.313.642,00	13.369.353.341,00	95,13%
BELANJA MODAL	5.600.620.375,00	5.380.309.000,00	96,07%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.865.220.375,00	2.797.439.000,00	97,63%

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.735.400.000,00	2.582.870.000,00	94,42%
JUMLAH	23.420.198.819,00	22.299.184.635,00	95,21%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023

Adapaun realisasi program/ kegiatan/ Sub Kegiatan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 tertuang dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2. Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 berdasarkan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.511.824.442	5.160.061.901	93,62
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.910.000	1.474.000	77,17
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.118.000	682.000	61,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	792.000	792.000	100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.920.814.802	3.703.525.848	94,46
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.587.944.802	3.389.380.793	94,47
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	153.000.000	151.933.555	99,30
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	177.320.000	160.141.500	90,31
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	975.000	960.000	98,46

1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.125.000	660.000	58,67
1.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	450.000	450.000	100,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	107.433.200	105.567.400	98,26
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	102.933.200	101.067.400	98,19
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.500.000	4.500.000	100,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	697.584.400	602.216.663	86,33
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.852.500	6.103.656	77,73
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.822.900	94.536.200	91,94
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	216.999.600	184.824.550	85,17
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.807.200	19.318.300	74,86
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.527.100	27.232.500	89,21
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.200.000	14.974.400	92,43
14.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297.375.100	255.227.057	85,83

1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	167.634.800	159.155.000	94,94
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167.634.800	159.155.000	94,94
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.969.240	487.841.172	96,42
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339.969.240	334.932.328	98,52
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.000.000	152.908.844	92,11
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.478.000	100.281.818	90,77
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.000.000	52.901.700	91,21
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.478.000	47.380.118	90,29
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	6.681.695.277	6.445.851.385	96,47
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.681.695.277	6.445.851.385	96,47
2.1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	294.509.000	273.607.733	92,90
2.1.2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	125.838.400	107.046.600	85,07
2.1.3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	242.448.000	225.242.553	92,90

2.1.4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.962.030.700	1.941.474.355	98,95
2.1.5	Pelayanan Informasi Publik	191.348.900	183.369.700	95,83
2.1.6	Layanan Hubungan Media	3.589.506.400	3.460.466.244	96,41
2.1.7	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	117.700.200	106.728.500	90,68
2.1.8	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	43.486.400	38.861.700	89,37
2.1.9	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	114.827.277	109.054.000	94,97
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	9.780.841.600	9.363.854.332	95,74
3.1	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerinatah daerah kabupaten/kota	20.817.400	19.990.300	96,03
3.1.2	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	20.817.400	19.990.300	96,03
3.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.760.024.200	9.343.864.032	95,74
3.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.280.000	1.280.000	100,00

3.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	3.058.400.000	2.989.390.195	97,74
3.2.3	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	104.250.000	100.045.000	95,97
3.2.4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	666.300.000	632.438.811	94,92
3.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.765.337.200	2.667.102.367	96,45
3.2.6	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.974.037.000	2.795.356.470	93,99
3.2.7	Pengelolaan Government chief informasi officer (GCIO)	131.170.000	104.990.189	80,04
3.2.8	Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	59.250.000	53.261.000	89,89
3.2.8	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	585.809.700	556.855.450	95,06
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	585.809.700	556.855.450	95,06
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	344.999.600	332.872.750	96,48
4.1.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	240.810.100	223.982.700	93,01
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	860.027.800	772.561.566	89,83

	Persandian untuk Pengamanan Informasi			
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	860.027.800	772.561.566	89,83
5.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	860.027.800	772.561.566	89,83
TOTAL		**23.420.198.819**	**22.299.184.634**	**95,21**

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023

Berdasarkan Tabel di atas, secara umum Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 mencapai 95,21%, dimana hampir semua sub kegiatan mencapai realisasi di atas 80%. Namun terdapat 4 sub kegiatan yang capaian realiasisi di bawah 80% dengan alasan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan realisasi sebesar 61,00%. Target realisasi tidak tercapai disebabkan anggaran disesuaikan dengan realisasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD , dengan realisasi 58,67%. Target realisasi tidak tercapai disebabkan penyerapan anggaran disesuaikan dengan pembayaran tagihan jasa telpon disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi 77,73%. Target realisasi tidak tercapai disebabkan penyerapan anggaran disesuaikan dengan pembayaran tagihan jasa Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai dengan kebutuhan
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi 74,86%. Target realisasi tidak tercapai disebabkan penyerapan anggaran disesuaikan kebutuhan bahan logistik kantor.

Capaian Renstra Diskominfo Tahun 2025

Target capaian kinerja Renstra dan realisasi Target Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2025 dijelaskan dalam tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri s/d Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	**2**	**16**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	600	200	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.1	**2**	**16**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	24	8	**4**	**4**	**100**	**4**	**4**	**100**
1.1.1	2	16	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	18	6	3	3	100	3	3	100
1.1.2	2	16	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	2	1	1	100	1	1	100

1.2	**2**	**16**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	120	40	**20**	**20**	**100**	**20**	**20**	**100**
1.2.1	2	16	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	28	34	28	82	32	32	82
1.2.2	2	16	01	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	78	26	13	13	100	13	13	100
1.2.3	2	16	01	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	24	12	12	100	12	12	100
1.2.4	2	16	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	2	1	1	100	1	1	100
1.2.5	2	16	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	28	18	18	100	18	18	100
1.2.6	2	16	01	2.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	4	2	2	100	2	2	100

1.3	**2**	**16**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	12	4	**14**	**14**	**100**	**2**	**2**	**100**
1.3.1	2	16	01	2.03	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	4	2	2	100	2	2	100
1.3.2	2	16	01	2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72	24	12	12	100	-	-	100
1.4	**2**	**16**	**01**	**1.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	1	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	2	16	01	1.05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1	-	-	-	-	-	-	-
1.5	**2**	**16**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**	180	60	**30**	**16**	**53**	**30**	**30**	**100**
1.5.1	2	16	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	8	4	4	100	4	4	100
1.5.2	2	16	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	8	4	4	100	4	4	100
1.5.3	2	16	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	8	4	4	100	4	4	100
1.5.4	2	16	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	8	4	4	100	4	4	100
1.5.5	2	16	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	8	4	4	100	-	-	100

1.5.6	2	16	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	8	12	12	100	12	12	100
1.5.7	2	16	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	31	12	12	100	12	12	100
1.6	**2**	**16**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	6	-	**6**	**6**	**100**	-	-	**100**
1.6.1	2	16	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	-	6	7	117	-	-	117
1.7	**2**	**16**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**	72		**1**	**1**	**100**	**12**	**12**	**100**
1.7.2	2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	24	12	3	25	-	-	25
1.7.1	2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	24	12	12	100	12	12	100
1.7.3	2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	-	12	12	100	12	12	100
1.8	**2**	**16**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	180	60	**30**	**30**	**100**	**30**	**30**	**100**

1.8.1	2	16	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	84	28	16	16	100	16	16	100
1.8.2	2	16	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96	32	16	16	100	25	25	100
2	**2**	**16**	**02**		**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik**		**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**25**	**25**
2.1	**2**	**16**	**02**	**2.01**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota**	925	**3342**	**500**	**500**	**100**	**900**	**-**	**-**
2.1.1	2	16	02	2.01	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60	250	12	12	100	-	-	-
2.1.2	2	16	02	2.01	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	80	335	5	5	100	3	-	-
2.1.3	2	16	02	2.01	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	925	3342	500	500	100	12	3	25
2.1.4	2	16	02	2.01	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6	8	46	46	100	28	28	100

2.1.5	2	16	02	2.01	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	45	100	6	6	100	6	-	-
2.1.6	2	16	02	2.01	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	50	80	45	45	100	62	62	100
	2	16	02	2.01	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			5	5	100	5	-	-
2.1.7	2	16	02	2.01	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	80	314	70	70	100	-	-	-
2.1.8	2	16	02	2.01	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah peserta pelatihan SDM dan sinkronisasi PPID	170	0	0	-	-	-	-	-
	2	16	02	2.01	Penyediaan /Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1	1	100	-	-	-
2.1.9	2	16	02	2.01	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah peserta Bakoinmas	130	420	0	-	-	-	-	-
3	**2**	**16**	**03**		**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Cakupan layanan jaringan intra pemerintah daerah**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**	**-**
3.1	**2**	**16**	**03**	**2.01**	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah nama domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah yang terkelola**	300	**200**	**40**	**40**	**100**	**-**	**-**	**-**
3.1.1	2	16	03	2.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah yang terkelola	300		-	-	-	-	-	-

3.1.2	2	16	03	2.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	300	1200	40	40	100	-	-	-
3.2	**2**	**16**	**03**	**2.02**	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah layanan SPBE yang terkelola**	170	**340**	**170**	**170**	**100**	**170**	**170**	**100**
3.2.1	2	16	03	2.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1	1	1	100	-	-	-
3.2.2	2	16	03	2.02	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	95	95	100	100	100	-	-	-
3.2.3	2	16	03	2.02	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	125	137	125	125	100	-	-	-
3.2.4	2	16	03	2.02	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	21	18	17	17	100	-	-	-
3.2.5	2	16	03	2.02	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Prosentase aplikasi terintegrasi SPBE Kabupaten Kediri	30		-	-	-	-	-	-

3.2.6	2	16	03	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	70	350	150	150	100	-	-	-
3.2.7	2	16	03	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	6	12	6	6	100	1	1	100
3.2.8	2	16	03	2.02	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1	1	1	1	100	2	1	50
3.2.8	2	16	03	2.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	1	1	1	100	-	-	-
4	**2**	**20**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Ketersediaan statistik sektoral di lingkup daerah**		**2**	**100**	**100**	**-**	**100**	**75**	**-**
4.1	**2**	**20**	**02**	**2.01**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah**	1	**2**	**1**	**0**	**-**	**1**	-	-
4.1.1	2	20	02	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	2	1	1	100	4	1	25

4.1.2	2	20	02	2.01	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2	4	1	1	100	-	-	-
5	**2**	**21**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Cakupan keamanan persandian dan TI**	**600**	**200**	**100**	**100**	**-**	**100**	**25**	**-**
5.1	**2**	**21**	**02**	**2.01**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman**	**6**	**6**	**1**	**0**	**-**	**1**	**-**	**-**
5.1.1	2	21	02	2.01	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6	6	1	1	100	6	1	17

Tabel 2.3

Berdasarkan table 2.3 terdapat perubahan nomenklatur 1350 pada tahun 2025 yang menyebabkan ketidaksesuaian anatara sub kegiatan pada tahun 2022 dengan tahun 2025. Diantara sub kegiatan yang mengalami perubahan target dan pagu anggaran terdapat pada Program Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Serta Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dapat lebih terarah yang secara administrative dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggunagjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan hasil analisis capaian indikator anggaran belanja tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri telah tercapai baik dengan tingkat capaian sebesar 86,41% (Delapan Puluh Enam Koma Empat Puluh Satu Persen). Adapun Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dan proyeksi tahun 2023 dan 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4. sebagai berikut:

KABUPATEN KEDIRI
RENCANA KERJA TAHUN 2025

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

NO	Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Renstra			Realisasi Capaian	Proyeksi		
			2024	2025	2026	2024	2024	2025	2026
I	**INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)**								
1	Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks/ Predikat	43,75	59,31	60,46	43,75	43,75	59,31	60,46
2	Nilai Indeks SPBE	Indeks/ Predikat	4,27	4,30	4,32	4,27	4,27	4,30	4,32
3	Nilai Indeks PPID	Indeks	78	79	79,12	78	78	79	79,12
4	Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai/ Kategori	1,30	1,35	3,35	1,30	1,30	1,35	3,35
5	Nilai Indeks KAMI	Nilai/ Predikat	641	650	661	641	641	650	661
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
A	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.	%	100	100	100	100	100	100	100

2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	70,01	70,01	70,01	70,01
	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT								
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100

3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100

6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100

10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100

17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100

B	URUSAN STATISTIK								
	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT								
1	Tersedianya buku profil daerah	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah	10	10	10	1	1	1	1

3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah	35	35	35	24	24	24	24
4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah	10	10	10	1	1	1	1
5	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah	35	35	35	24	24	24	24
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistic	%	100	100	100	100	100	100	100
C	URUSAN PERSANDIAN								
	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah melalui keterkacaian Indeks Kemanan Informasi (Indeks KAMI)	%	100	100	100	98,46	98,46	98,46	98,46

	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT								
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	100	100	100	85	85	85	85
2	Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100
D	URUSAN PROGRAM								
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	%	100	100	98,46	98,46	98,46	98,46	

4	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indeks	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Indeks	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
6	Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
7	Nilai aspek Penyelenggara SPBE	Indeks	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
8	Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Indeks	5,00	5,00	5,00	3,25	3,25	3,25	3,25
9	Nilai aspek Audit TIK	Indeks	5,00	5,00	5,00	2,67	2,67	2,67	2,67
10	Nilai aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	5,00	5,00	5,00	4,60	4,60	4,60	4,60
11	Nilai aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks	5,00	5,00	5,00	4,67	4,67	4,67	4,67

12	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Level	Informatif	Informatif	Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif
13	Nilai Indeks Pembangunan Statistik	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Kurang Baik	Kurang Baik	Kurang Baik	Kurang Baik
14	Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Nilai Pilar	58,10	58,10	58,10	43,47	43,47	43,47	43,47
		Nilai Sub Pilar	56,26	56,26	56,26	43,56	43,56	43,56	43,56

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, dihadapkan oleh isu-isu terkait:

1. Pengelolaan Data Statistik Sektoral
2. Keamanan Informasi
3. Sumber Daya Manusia pelaksana tugas TIK
4. Infrastruktur TIK

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebagai Perangkat Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sesuai dengan tugas dan fungsinya dihadapankan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal maupun secara eksternal anatara lain:

1. Indeks IPS masih 1,3 (kategori kurang).
2. Portal Satu Data belum terintegrasi dengan SDI pusat.
3. Statistik sektoral belum dianggap penting oleh semua pihak.
4. Belum ada SOP, Petunjuk Teknis, Buku Pedoman pelaksanaan statistik sektoral.
5. Kurangnya SDM yang menangani Satu Data Indonesia.
6. Tidak ada SDM Statistisi dan Sarjana/ Diploma Statistik.
7. Belum adanya Pusat Pemulihan Data (DRC).
8. Belum terbentuknya Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber.
9. Belum terisinya jabatan khusus bidang keamanan informasi dan pengamanan persandian.
10. Belum terlaksananya peningkatan kompetensi SDM keamanan informasi dan pengamanan persandian secara rutin.
11. Belum terlaksananya pengamanan informasi untuk kegiatan Pimpinan Daerah.
12. Belum terselenggaranya pengamanan dokumen elektronik untuk Pemerintah Daerah dan Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
13. Belum terlaksananya sosialisasi kesadaran keamanan informasi untuk pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri secara rutin.
14. Belum terlaksananya audit keamanan SPBE dan asesmen eksternal untuk Indeks KAMI.

15. Belum terlaksananya perlindungan data pribadi untuk sistem elektronik di Pemerintah Kabupaten Kediri.
16. Belum terlaksananya kegiatan kriptografi untuk pengamanan email.
17. Sulitnya permintaan data terkait transparansi dan partisipasi publik dari OPD-OPD di Pemerintah Kabupaten Kediri.
18. Infrastruktur server yang meliputi perangkat dan ruang server masih terbatas dan kurang layak.
19. Terbatasnya kapasitas SDM untuk pelaksanaan tugas APTIKA.
20. Masih lemahnya tata kelola dan manajemen teknis pada layanan aptika.

2.3.2 Rekomendasi dan Catatan yang Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Perlunya koordinasi dan kolaborasi dari semua pihak, baik pembina data, coordinator data, walidata, walidata pendukung, produsen data serta pengambil kebijakan.
2. Koordinasi lebih lanjut dengan SDI pusat.
3. Perlunya kebijakan yang menjadikan statistik sektoral sebagai kegiatan penting.
4. Kerjasama dengan pihak ketiga.
5. Perlunya tambahan SDM dibidang Statistik, terutama Stastisi, Sarjana/ Diploma Statistik.
6. Melaksanakan backup data di Pusat Data Nasional (PDN) dan pusat dana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
7. Melengkapi persyaratan pengajuan pendaftaran Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber dan berkoordinasi dengan BSSN.
8. Melaksanakan penghitungan kebutuhan JF Manggala Informatika dan JF Sandiman dan berkoordinasi dengan BKD untuk usulan kebutuhan jabatan.
9. Bekerjasama dengan BSSN dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM keamanan informasi dan pengamanan persandian.
10. Melaksanakan pengadaan perangkat kontra penginderaan dalam rangka pengamanan informasi untuk kegiatan Pimpinan Daerah.

11. Memfasilitasi pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk seluruh pejabat di Pemerintah Desa dan Sekolah Negeri dalam rangka pemanfaatan TTE di aplikasi seperti SRIKANDI.
12. Secara rutin melaksanakan sosialisasi kesadaran keamanan informasi untuk pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri minimal dua kali dalam setahun.
13. Menjadwalkan audit keamanan SPBE minimal satu kali dalam setahun dan berkoordinasi dengan BSSN untuk melaksanakan asesmen eksternal untuk Indeks KAMI.
14. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan sarana perlindungan data pribadi untuk data masking pada sistem elektronik.
15. Mengatasi kesenjangan waktu pelayanan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.
16. Perlu adanya etikat baik dan proaktif untuk pemenuhan data terkait transparansi dan partisipasi publik dari OPD-OPD di Pemerintah Kabupaten Kediri.
17. Meningkatkan Infrastruktur server yang meliputi penambahan perangkat server dan perbaikan ruang server.
18. Meningkatkan kapasitas SDM melalui penambahan jumlah personil teknis dan pelatihan teknis tertentu.
19. Menguatkan tata kelola dan manajemen teknis melalui penyusunan SOP, pedoman teknis dan pendokumentasian layanan yang dilakukan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD sebagai panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan metode teknokratik dan partisipatif. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada tahun 2025 lebih memaksimalkan dan meningkatkan peran Dinas dalam hal pengelolaan Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlihat pada tabel 2.5. berikut ini:

Tabel 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kediri

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp. 000)**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kabupaten Kediri	**persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	600	6.998.642.589	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kabupaten Kediri	**persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	600	3.615.173.616	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kediri	**jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	24	880.000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kabupaten Kediri	**jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	24	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kediri	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	18	440.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kediri	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	18	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kediri	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	440.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kediri	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Kediri	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	120	5.403.351.189	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kabupaten Kediri	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	120	2.867.279.038	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kediri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	4.224.651.189	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kediri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	2.320.470.022	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	78	1.033.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	78	464.409.016	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	143.880.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	82.400.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	440.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	440.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84	-	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	440.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Kediri	**Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	12	102.000.000	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kabupaten Kediri	**Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	12	45.000.000	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Kediri	**Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	12	102.000.000	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kabupaten Kediri	**Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	12	45.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	102.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	45.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Kediri	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	1	-	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kabupaten Kediri	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	1	-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kediri	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kediri	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Kediri	**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**	180	717.365.400	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Kediri	**Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah**	180	437.778.016	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	1.564.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	76.059.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	22.468.900	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	5.902.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	1.200.000	

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	5.902.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	1.200.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	15.397.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	5.846.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Kediri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	-	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	22.925.100	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	6.484.600	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	595.516.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	401.778.516	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Kediri	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	6	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Kediri	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	6	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kediri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kediri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Kediri	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**	72	726.546.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Kediri	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**	72	254.754.062	

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	**Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota**	925	5.924.469.100	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Kediri	**Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota**	925	1.825.380.080	
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60	-	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60	-	
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	80	172.541.500	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	80	-	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	925	200.720.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	925	27.407.080	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6	2.305.066.400	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6	534.930.000	
Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	45	157.108.000	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	45	-	
Layanan Hubungan Media	Kabupaten Kediri	Jumlah Layanan Hubungan Media	50	2.981.906.300	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Kediri	Jumlah Layanan Hubungan Media	50	1.263.043.000	
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		107.126.900	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		-	

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabupaten Kediri	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	80	-	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabupaten Kediri	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	80	-	
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten Kediri	Jumlah peserta pelatihan SDM dan sinkronisasi PPID	170	-	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten Kediri	Jumlah peserta pelatihan SDM dan sinkronisasi PPID	170	-	
Penyediaan /Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	Penyediaan /Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Kediri	Jumlah peserta Bakoinmas	130	-	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten Kediri	Jumlah peserta Bakoinmas	130	-	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kabupaten Kediri	**Cakupan layanan jaringan intra pemerintah daerah**		5.052.306.000	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Kabupaten Kediri	**Cakupan layanan jaringan intra pemerintah daerah**		2.054.389.238	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	**Jumlah nama domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah yang terkelola**	300	-	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Kediri	**Jumlah nama domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah yang terkelola**	300	-	
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah nama domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah yang terkelola	300	-	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah nama domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah yang terkelola	300	-	

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	300	-	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	300	-	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	**Jumlah layanan SPBE yang terkelola**	170	5.052.306.000	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Kediri	**Jumlah layanan SPBE yang terkelola**	170	2.054.389.238	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		-	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		-	
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten Kediri	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	95	-	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten Kediri	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	95	-	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	125	-	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	125	-	

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Kediri	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	21	-	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Kediri	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	21	-	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten Kediri	Prosentase aplikasi terintegrasi SPBE Kabupaten Kediri	30	-	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten Kediri	Prosentase aplikasi terintegrasi SPBE Kabupaten Kediri	30	-	
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	70	-	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	70	-	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	6	4.823.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	6	1.853.389.238	
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kabupaten Kediri	jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1	229.306.000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kabupaten Kediri	jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1	201.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kabupaten Kediri	jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kabupaten Kediri	jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	-	

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten Kediri	**Ketersediaan statistik sektoral di lingkup daerah**		279.139.700	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Kabupaten Kediri	**Ketersediaan statistik sektoral di lingkup daerah**		69.459.300	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	**Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah**	1	279.139.700	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Kediri	**Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah**	1	69.459.300	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	243.651.900	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Kediri	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	58.940.000	
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Kediri	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2	-	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Kediri	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kabupaten Kediri	**Cakupan keamanan persandian dan TI**	**600**	775.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Kabupaten Kediri	**Cakupan keamanan persandian dan TI**	**600**	26.594.600	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kediri	**Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman**	**6**	775.000.000	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Kediri	**Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman**	**6**	26.594.600	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6	775.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6	26.594.600	

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri akan mengkaji dan menambah usulan program dan kegiatan dari masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam pembuatan program kegiatan berusaha untuk memperhatikan usulan-usulan dalam pelaksanaan Musrembang Kecamatan sedangkan untuk usulan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri maka usulan kegiatan tersebut diarahkan kepada Dinas yang terkait.

Tabel 2.6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pada pelaksanaan perencanaan jangka Panjang, menengah, maupun tahunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode 1 tahun. Tingkat keberhasilan perencanaan pembangunan di Indonesia, tidak akan terlepas dari dukungan yang diberikan oleh setiap daerah melalui perencanaan kebijakan di setiap periodenya (Panjang, Menengah, Tahunan). Daerah, sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 5 yang mengamanatkan bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan melalui prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
c. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
d. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
e. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;

KABUPATEN KEDIRI
RENCANA KERJA TAHUN 2025

f. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan

g. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability), dan memperhatikan fungsi waktu (times) (SMART).

Selanjutnya, dalam perencanaan pembangunan daerah terdapat 2 (dua) bentuk pendekatan, yaitu perencanaan yang berorientasi pada proses dan perencanaan yang berorientasi pada substansi (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). 4 (Empat) pendekatan yang harus digunakan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

a. Pendekatan Teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

b. Pendekatan Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

c. Pendekatan Politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

d. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Selain berorientasi pada proses, perencanaan pembangunan daerah juga dilaksanakan dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan yang berorientasi pada substansi, yaitu tematik, holistik, integratif, dan spasial:

a. Pendekatan Tematik, penentuan tema prioritas pembangunan dalam suatu jangka waktu perencanaan.

b. Pendekatan Holistik, bermakna bahwa perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan,

hambatan dan/ atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

c. Pendekatan Integratif, upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pembangunan yang dilihat dari peran kementerian/ lembaga/ daerah/ pemangku kepentingan lainnya serta upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

d. Pendekatan Spasial, penjabaran program pembangunan dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Selama 78 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Indonesia berupaya untuk menjadi negara high income (berpendapatan tinggi) dan menjadi 5 (lima) besar untuk ranking Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia serta menjadi negara maju di tahun 2045 mendatang. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Dengan demikian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan RPJMN tahun 2020-2025, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023-2024, evaluasi kebijakan tahun 2023-2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan antara lain:



Gambar 3.2 Tema Pembangunan RKP Tahun 2025

Dari lima agenda pembangunan tersebut, kemudian dijabarkan dalam penekanan tema pembangunan, yaitu:

A. SDM Berdaya Saing dan Produktif

1. Transformasi Sosial, dengan penekanan tema pembangunan:

a. Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun.
b. Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan.
c. Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting.
d. Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif.
e. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas.
f. Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system.

2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan penekanan tema pembangunan:

a. Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti).

B. Infrastruktur untuk Peningkatan Produktifitas

1. Transformasi Ekonomi, dengan penekanan tema pembangunan:

a. Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur
b. konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
c. Penguatan infrastruktur digital.
d. Pengembangan infrastruktur transisi energi.
e. Percepatan infrastruktur IKN.

2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan penekanan tema pembangunan:

a. Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

C. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan.

1. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, dengan penekanan tema pembangunan:

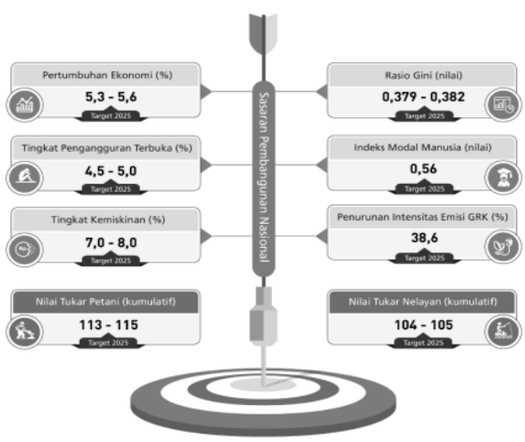
a. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
b. Pengembangan skema graduasi bansos.
c. Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.
d. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat.
e. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja.
f. Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan.
g. Peningkatan produksi industri pengolahan
h. Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif.
i. Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.



Gambar 3.2 Tema Pembangunan RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut.



Gambar 3.3 Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.



Gambar 3.3 Prioritas Nasional

Berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan mendukung pada agenda pembangunan tranformasi ekonomi dengan fokus penguatan infrastruktur digital.

Adapun terdapat 8 Prioritas Nasional (PN) pada wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 yang masuk dalam RKP 2025 antara lain:

A. Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

1. Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat.
2. Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik.
3. Pembangunan dan revitalisasi Museum PETA (Pembela Tanah Air).

B. Prioritas Nasional (PN) 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

1. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Mojolagres (100 liter/detik).
2. Pembangunan Intake Sungai Rejoso (1.000 liter/detik) dan Jaringan Pipa.
3. Transmisi Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan.
4. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kali Rejoso (1.000 liter/detik).
5. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan.
6. Revitalisasi Pipa Jaringan Distribusi Utama Kabupaten-Kota Probolinggo.
7. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kabupaten Mojokerto.
8. Peningkatan logistik dan perdagangan berbasis biru berkelanjutan.
9. Penguatan industri manufaktur berbasis kelautan – perkapalan dan garam.
10. Pengembangan industrialisasi perikanan yang modern terintegrasi, dan berkelanjutan.
11. Penguatan Pangkalan Utama Angkatan Laut Surabaya dalam rangka penguatan pengamanan maritim terhadap Surabaya dan garda maritim Indonesia bagian timur.
12. Fasilitasi business matchmaking startup digital.
13. Fasilitasi digital technopreneur.
14. Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian.
15. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Banyuwangi serta tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle.

C. Prioritas Nasional (PN) 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

1. Penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah vokasi yang memiliki interlinkage and match yang kuat dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry.
2. Lanjutan Pengendalian Banjir Sungai Buntung (akses Bandara Juanda).
3. Lanjutan Pengendalian Banjir Sungai Lamong.
4. Revitalisasi pelatihan vokasi di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Surabaya.
5. Pembangunan Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
6. Pembangunan dan revitalisasi Pasar Beran.
7. Pembangunan Jalan Pansela.
8. Preservasi Jalan mendukung Java Integrated and Industrial Port Estate Gresik Ruas Sadang (Bts. Kabupaten Lamongan) - Bts. Kota Gresik.
9. Preservasi Jembatan Manyar mendukung Java Integrated and Industrial Port Estate Gresik.
10. Penggantian dan Duplikasi Jembatan Modangan.
11. Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Nasional Ruas Bulu - Bts. Kota Tuban.
12. Pelebaran Jalan Nasional Situbondo-Ketapang.
13. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Nasional.
14. Sentra Pengolahan Perikanan Bengkorok (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terpadu).
15. Peningkatan sarana dan prasarana Bandara Abdurrachman Saleh.
16. Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman.
17. Penguatan produktivitas industri tekstil dan produksi tekstil dan alas kaki.
18. Penguatan ekosistem kuliner.

19. Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan
20. infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata Kelola
21. Revitalisasi Pipa Jaringan Distribusi Utama Kabupaten/Kota Probolinggo
22. Rehabilitasi Daerah Irigasi Pondok dan Pacal.
23. Pengendalian banjir Kali Jeroan, Ring Ngotok Kanal, dan Kali Konto Hilir
24. Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi.
25. Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif.
26. Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim.

D. Prioritas Nasional (PN) 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

1. Optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di semua jenjang Pendidikan.
2. Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan.
3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui sistem pemagangan dalam negeri.
4. Penurunan kematian ibu dan bayi.
5. Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria).
6. Pembangunan kualitas keluarga.
7. Percepatan penurunan ketimpangan gender melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, dan

KABUPATEN KEDIRI
RENCANA KERJA TAHUN 2025

pencegahan tindak pidana perdagangan orang pada wilayah kantong pekerja migran.

8. Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
9. Perluasan akses perguruan tinggi keagamaan melalui pengembangan IAIN Kediri.
10. Fasilitasi literasi digital.
11. Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi sciences, technology, engineering, art, dan mathematics unggulan bertaraf internasional pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) "Higher Education for Technology and Innovation Project" (HETI) dan Universitas Brawijaya melalui proyek Pinjaman Luar Negeri KfW "Quality Improvement of Academic Hospital of Brawijaya University".
12. Peningkatan kualitas dan pengembangan politeknik sciences, technology, engineering, art, dan mathematics unggulan pada Politeknik Negeri Madura, Politeknik Negeri Madiun, dan Politeknik Negeri Malang.

E. Prioritas Nasional (PN) 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

1) Hilirisasi industri tembaga dan bauksit.
2) Hilirisasi industri sawit, kelapa, dan karet.
3) Hilirisasi industri rumput laut.
4) Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi.
5) Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar.
6) Pengembangan industri elektronik dan digital.

7) Pengembangan industri alat angkut termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan.
8) Pengadaan kapal perintis.
9) Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik.
10) Pengembangan Bandara Hub Juanda.

F. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

1) Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
2) Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Wilayah Madura.
3) Surabaya Regional Railway Line.
4) Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di Metropolitan Surabaya.

G. Prioritas Nasional (PN) 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

1. Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital.

H. Prioritas Nasional (PN) 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

1. Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan.
2. Rehabilitasi kerusakan lahan.

3. Pengembangan perhutanan sosial melalui sarana ekonomi produktif, penyediaan tenaga pendamping, fasilitasi penyusunan dan pengesahan rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial, dan fasilitasi peningkatan kelompok usaha perhutanan sosial ke kelas gold.
4. Pengendalian lahar Gunung Semeru.

Pada Prioritas Pembangunan nasional, adapun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri masuk pada prioritas nasional :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan fokus Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik.
2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dengan fokus Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi.
3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dengan fokus Fasilitasi literasi digital.
4. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba denga fokus Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Tujuan dan Sasaran ditetapkan untuk mencapai Visi Bupati Kediri sebagai Visi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yaitu VISI "**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasional-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani**" sebagai penjelasannya:

Maju

Suatu kondisi harapan yang akan diwujudkan untuk masyarakat Kediri dengan semakin meningkatnya daya saing daerah yang diiringi dengan kemajuan pembangunan kawasan, sumber daya manusia, birokrasi pemerintahan, layanan publik, serta dukungan teknologi yang unggul.

Berkarakter Nasional Religius

Merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan, gotong-royong, norma agama, social budaya sehingga menempatkan pribadi sebagai manusia yang beradab dalam bingkai Pancasila.

Sejahtera

Merupakan kondisi masyarakat Kediri yang memiliki taraf hidup yang baik dan mampu memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak melalui kegiatan keseharian yang mapan.

Ekonomi Kerakyatan

Merupakan sistem ekonomi yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak melalui kegiatan ekonomi yang menitikberatkan pada peran masyarakat dengan mempergunakan sumber daya ekonomi local yang tumbuh menjadi satu kesatuan pembangunan ekonomi daerah.

Birokrasi Yang Melayani

Merupakan kondisi birokrasi pemerintahan yang memenuhi sebagian besar reformasi birokrasi, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja untuk bertransformasi menjadi pelayan publik yang baik sekaligus mitra dan pengayom masyarakat menuju kesejahteraan dan kemajuan Kediri.

Dalam MISI yang kedua yaitu "**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**". Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Misi Kedua tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah "**Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, dengan indikator : indeks Reformasi Birokrasi**". Sedangkan sasaran yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah "**Meningkatkan Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks SPBE**".

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Tebel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik		Indeks SPBE	3.88	4,04	4,28	4,52	4,76	5,00
2.		Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	E	D	C	C	B	A

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam Renja ini adalah demi pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Selain itu faktor penunjang lainnya adalah pencapaian target renstra Perangkat Daerah dan wujud nyata pengimplementasian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada Tahun 2025 akan melaksanakan 3 urusan yang terbagi ke dalam 5 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Pagu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada Tahun 2025, mengalami penyesuaian dibandingakan dengan pagu pada rancangan awal RKPD menyesuaiakan dengan kemapuan keuangan daerah. Hal ini berakibat adanya beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan adanya pengurangan kuantitas output sub kegiatan. Namun demikian diharapkan target capaian program, sasaran dan tujuan perangkat daerah tetap dapat dipenuhi. Adapun rincian urusan, program dan sub kegiatan tergambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Linearitas Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatkan Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan

				Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan

				Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak

			Daerah	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Relasi Media
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Pelayanan Informasi Publik
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Penyusunan Konten
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
				Koordinasi dan Fasilitasi

				Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
				Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada Tahun 2025 akan melaksanakan 3 urusan yang terbagi ke dalam 5 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 1 (satu) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Adapun untuk pendanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 sebesar Rp. 24.606.529.493,00 (dua puluh empat milyar enam ratus enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah). Secara rinci, dapat dijealskan dalam tabel 4 berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT SECARA RINCI	BIDANG PENGAMPU
1	2	3	4	5
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.807.618.593,00**		**Sekretariat**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.707.300,00		Sekretariat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.489.800,00	3 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.217.500,00	1 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2	Administrasi Keuangan	5.605.720.061,00		Sekretariat

	Perangkat Daerah -			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.506.165.161,00	44 orang/bulan Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	924.300.000,00	35 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	171.360.000,00	6 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.762.200,00	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.555.500,00	14 Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	577.200,00	2 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	134.750.600,00		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	121.550.600,00	2 Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000,00	2 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.853.018.900,00		Sekretariat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.054.400,00	4 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

			yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.308.681.200,00	4 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.325.400,00	4 Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.665.000,00	4 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.458.900,00	4 Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.560.000,00	4 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.274.000,00	20 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	901.121.732,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	479.121.732,00	12 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.000.000,00	4 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.300.000,00		Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.500.000,00	14 unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.800.000,00	16 unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**7.813.577.000,00**		**Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7.813.577.000,00		Bidang Informasi dan

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Komunikasi Publik
	Relasi Media	4.542.280.700,00	12 laporan aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	202.374.500,00	3 Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	
	Pelayanan Informasi Publik	251.905.900,00	5 permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	144.944.900,00	12 rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.500.000.000,00	36 media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	
	Penyusunan Konten	172.071.000,00	500 Konten Informasi Publik	
III	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**5.900.000.000,00**		**Bidang Aplikasi dan Informatika**
1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.900.000.000,00		Bidang Aplikasi dan Informatika
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	5.700.000.000,00	1 laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	
	Koordinasi dan Fasilitasi	200.000.000,00	40 unit perangkat	

	Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**262.542.000,00**		**Bidang Statistik**
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	262.542.000,00		Bidang Statistik
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	149.969.000,00	100% Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	112.573.000,00	25 dokumen Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**822.791.900,00**		**Bidang Persandian untuk Pengamanan Informasi**
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	822.791.900,00		Bidang Persandian untuk Pengamanan Informasi
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	822.791.900,00	6 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
TOTAL ANGGARAN		**24.606.529.493,00**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas serta memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya guna mendukung tercapainya target perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan-usulan dari para pemangku kepentingan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manuasia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam melaksanakan dan mengimplementasikannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kediri, 2 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI

Dr. NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19811203 200604 1 014

BUPATI KEDIRI

H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.